



LAPORAN PENDAHULUAN

KAJIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA SOLOK



Kerjasama

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SOLOK
dengan
PUSAT STUDI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**

2021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sasaran.....	3
1.5. Lokasi Kegiatan	4
1.8. Keluaran Pekerjaan.....	5
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	6
2.1. Konsep dan Definisi Indikator Pembangunan Ekonomi.....	6
2.2. PDRB dan PDRB Per Kapita	7
2.3. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi.....	8
2.4. Inflasi	9
2.5. Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah	11
2.6. Pengangguran dan Ketenagakerjaan	12
2.7. Kemiskinan.....	14
2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15
2.9. Kemampuan Keuangan Daerah	17
BAB III METODOLOGI	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pembangunan suatu daerah. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan tersebut maka prosesnya mesti diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang baik, tepat, dan terukur sehingga melahirkan program/kegiatan yang efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan yang baik, selain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mesti didukung oleh data-data yang relevan dan merefleksikan fakta yang sesungguhnya tentang kesejahteraan masyarakat. Data-data tersebut akan menjadi indikator dalam melakukan monitoring dan evaluasi proses pembangunan daerah. Data yang konsisten dan terintegrasi dalam perekonomian secara keseluruhan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk melahirkan kebijakan pembangunan periode berikutnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanapembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam upaya menjaga keberlangsungan rancangan teknokratik RPJMD Kota Solok tahun 2021-2024 dimana salah satu sasaran pokoknya adalah

meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, sangat penting untuk mengetahui kondisi terkini mengenai perkembangan ekonomi wilayah secara menyeluruh untuk kemudian dapat memperkirakan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Olehkarena itu, perlu kiranya untuk dilakukan kajian indikator pembangunan ekonomi yang memberikan gambaran kondisi pembangunan ekonomi di Kota Solok, sehingga berbagai kebijakan dapat disusun dan diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan yang relevan dan tepat.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Permendagri Nomor 5 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya kajian Indikator Pembangunan Ekonomi di Kota Solok adalah untuk menyediakan data dan informasi dasar yang dapat mempresentasikan kondisi eksisting pembangunan ekonomi Kota Solok yang terukur berdasarkan indikator-indikator pembangunan ekonomi.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kajian ini adalah memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan di bidang pembangunan ekonomi Kota Solok.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya indikator-indikator pembangunan ekonomi di Kota Solok.

2. Terkumpul dan terdokumentasikannya seluruh data dan informasi yang diperlukan guna memenuhi indikator-indikator pembangunan ekonomi di Kota Solok.
3. Terpresentasikannya makna indikator-indikator pembangunan ekonomi di Kota Solok.
4. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Solok yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi untuk penguatan perekonomian masyarakat.

1.5. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan ini meliputi wilayah administratif Kota Solok yang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dan 13 (tiga belas) Kelurahan.

1.6. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini melingkupi seluruh wilayah Kota Solok dengan cakupan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok dan seluruh wilayah Kota Solok.

1.7. Tahapan Pekerjaan

Kajian ini melalui beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari:

- a. Melakukan persiapan manajemen dan administrasi pengkajian.
- b. Menyusun kebutuhan data/ informasi terkait.
- c. Melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder.
- d. Menganalisis dan membahas data dan informasi.
- e. Penyusunan laporan pendahuluan.
- f. Pembahasan Laporan pendahuluan oleh tim ahli dan tim teknis kajian.
- g. Finalisasi Laporan Pendahuluan.
- h. Pengumpulan data pendukung, baik data primer maupun sekunder.
- i. Penyusunan laporan antara.
- j. Pembahasan laporan antara oleh tim ahli dan tim teknis pengkajian

- k. Finalisasi laporan antara.
- l. Penyusunan laporan akhir.
- m. Pembahasan laporan akhir oleh tim ahli dan tim teknis pengkajian.
- n. Finalisasi laporan akhir.
- o. Menyusun ringkasan eksekutif.
- p. Seminar hasil kajian.
- q. Cetak dokumen publikasi.

1.8. Keluaran Pekerjaan

Keluaran (output) dari pekerjaan ini berupa 1 (satu) dokumententang:

- a. Analisis perkembangan indikator ekonomi Kota Solok tahun 2016-2020 yang meliputi :
 - 1) PDRB dan PDRB per kapita;
 - 2) Laju Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Laju Inflasi;
 - 4) Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah;
 - 5) Tingkat Pengangguran;
 - 6) Tingkat Kemiskinan;
 - 7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - 8) Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Analisis proyeksi pembangunan ekonomi yang dibutuhkan di Kota Solok yang nantinya dapat direkomendasikan menjadi referensi bagi Walikota Solok dan pengambilan kebijakan lainnya di Kota Solok khususnya terkait kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Konsep dan Definisi Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator pembangunan ekonomi adalah pengukuran statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik (bisa harian, bulanan, maupuntahunan) oleh pemerintah, lembaga-lembaga atau pun organisasi- organisasi swasta. Indikator pembangunan ekonomi tersebut dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri-industri, wilayah/daerah, ataupun negara. Fungsi utama indikator pembangunan ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini, memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang, dan membuat perbandingan kinerja perekonomian suatu daerah dalam konteks antar waktu maupun antar daerah. Fungsi lain dari indikator pembangunan ekonomi adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator pembangunan ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memperkenalkan konsep pengukuran kinerja pembangunan melalui tiga pilar pembangunan ekonomi inklusif yaitu: (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan. Keberhasilan pencapaian masing-masing pilar pembangunan ekonomi tersebut diukur melalui beberapa indikator. Indikator untuk melihat kinerja pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara lain adalah pertumbuhan PDRB riil per kapita, kontribusi manufaktur terhadap PDRB, kesempatan kerja dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN. Indikator untuk melihat kinerja pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan antara lain adalah indeks Gini, rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga

desa dan kota, dan persentase penduduk miskin. Kemudian, indikator untuk melihat perluasan akses dan kesempatan antara lain adalah Indeks Harapan Lama Sekolah, persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan, dan persentase rumah tangga dengan sumber air inum layak.

Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No. 86 Tahun 2017 juga mengemukakan sejumlah indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah indikatornya lebih banyak dari konsep yang dikemukakan oleh Bappenas. Semua indikator dibagi atas tiga kelompok yaitu : (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek Daya Saing, dan (3) Aspek Pelayanan Umum. Ada beberapa dari indikator tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh Bappenas.

Secara lebih spesifik, dalam rangka mencapai tujuan penyusunan dokumen ini, maka terdapat indikator-indikator pembangunan ekonomi yang perlu untuk diamati. Indikator-indikator dimaksud adalah PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pemerataan pembangunan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemampuan Keuangan Daerah, dan Rasio Pajak (*tax ratio*). Analisis dan kajian dari masing-masing indikator tersebut diharapkan menjadi masukan dalam membuat perencanaan dan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

2.2. PDRB dan PDRB Per Kapita

Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi tersebut dimiliki oleh penduduk negara tersebut atau penduduk negara lain. Data PDRB ini disajikan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dalam satuan mata uang negara terkait. PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB yang dihitung berdasarkan volume produksi dan harga pada saat

dilakukan perhitungan. PDRB harga konstan adalah PDRB yang dihitung berdasarkan volume produksi pada tahun tersebut tetapi harga yang digunakan adalah harga tahun tertentu sebagai tahun dasar sehingga pengaruh inflasi bisa diminimalisir.

Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi dilakukan dengan cara membagi aktivitas perekonomian menjadi beberapa kategori lapangan usaha dan nilai tambah yang terjadi di setiap lapangan usaha diaggregasi sehingga membentuk PDRB menurut lapangan usaha. Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan semua permintaan barang dan jasa dari setiap sektor pelaku ekonomi yaitu sektor rumah tangga, sektor dunia usaha, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Selanjutnya, pendekatan pendapatan yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa dari setiap faktor produksi pendapatan upah, sewa modal dan pendapatan dari usaha (keuntungan). Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) biasanya hanya menerbitkan data PDRB dengan pendekatan pertama dan kedua.

PDRB juga dapat disajikan dalam bentuk PDRB per kapita yang diperoleh dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata selama satu tahun. PDRB per kapita juga bisa disajikan dalam bentuk harga berlaku maupun harga konstan.

2.3. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah indikator ekonomi yang dihitung berdasarkan perkembangan PDRB harga konstan dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan ekonomi memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Laju Pertumbuhan Ekonomi ini bisa dilihat secara keseluruhan

dari PDRB, bisa juga dilihat per sektor PDRB. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

r_t = laju pertumbuhan ekonomi tahun t (%)

Y_{t-1} = PDRB tahun t-1

Y_t = PDRB tahun t

Kontribusi sektor perekonomian adalah persentase (proporsi) masing-masing sektor terhadap total PDRB. Peran/kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah memperlihatkan struktur perekonomian suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian daerah tersebut. Formula untuk mendapat besaran kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha adalah sebagai berikut :

$$kontibusi_i = \frac{PDRB_i}{PDRB_{total}} \times 100\%$$

dimana :

$kontibusi_i$ = kontribusi sektor i

$PDRB_i$ = PDRB sektor i

$PDRB_{total}$ = Total PDRB

2.4. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Untuk mengukur perubahan harga dari dua periode waktu yang berbeda digunakan angka indeks harga. Angka indeks harga adalah angka yang menunjukkan perbandingan harga dalam dua waktu yang berbeda, sehingga angka indeks harga didefinisikan sebagai angka perbandingan antara harga komoditi atau kelompok komoditi yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu yang telah ditentukan.

Penghitungan inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Sejak Januari 2014, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota yang mencakup sekitar 225 – 462 komoditas. Metode yang digunakan dalam penghitungan IHK adalah formula Laspeyres yang telah dimodifikasi, yaitu:

$$I_n = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{n-1}} P_{n-1} Q_0}{\sum P_0 Q_0} \times 100$$

dimana:

I_n = Indeks bulanan

P_n = Harga pada bulan ke-n

P_{n-1} = harga pada bulan ke-(n-1)

P_0 = Harga pada tahun dasar

Q_0 = Kuantitas pada tahun dasar

Untuk menghitung inflasi digunakan rumus berikut :

$$\text{Inflasi}_n = (I_n - I_{n-1}) / I_{n-1} \times 100$$

dimana:

Inflasi_n = Inflasi bulan n

I_n = IHK bulan n

I_{n-1} = IHK bulan n-1

Data inflasi dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Tidak semua kabupaten/kota di Indonesia melakukan penghitungan inflasi secara tersendiri. Untuk Provinsi Sumatera Barat ada dua wilayah yang diamati pergerakan harga komoditinya yaitu Kota Padang dan Bukittinggi. Angka inflasi yang dipublikasikan merupakan representasi dari inflasi Sumatera Barat. Masing masing kabupaten / kota mengacu kepada angka inflasi tingkat provinsi.

2.5. Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pemerataan pembangunan secara umum dapat diartikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan secara merata dan adil pada setiap daerah dan dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang tidak merata antar daerah dan antar lapisan masyarakat disebut juga dengan istilah ketimpangan pembangunan. Implikasi dari ketimpangan pembangunan adalah terjadinya ketimpangan pendapatan.

Menurut Wie (1981) ada 3 kategori ketimpangan pendapatan yaitu ketimpangan pendapatan antargolongan penerima pendapatan (*size distribution oncome*), ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*) dan ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*). Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini dan Indeks Williamson. Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sedangkan Indeks Williamson mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah (daerah).

Pengukuran tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Indeks Gini. Istilah lain dari Indeks Gini adalah Rasio Gini Pendapatan. Namun demikian, mengingat sulitnya mendapatkan data pendapatan maka data pengeluaran yang

bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) digunakan sebagai sebagai proksi pendapatan.

Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1. Bila koefisien Gini bernilai 0 maka maknanya adalah terjadinya pemerataan yang sempurna yakni setiap orang memiliki pendapatan dalam jumlah yang sama. Sebaliknya bila koefisien Gini bernilai 1 maka ini bermakna semua pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu sedangkan sisanya tidak memiliki apa-apa. Dalam realita tidak pernah terjadi koefisien Gini bernilai 0 atau 1 melainkan diantaranya. Adapun kriteria penilaian rasio Gini yang sering digunakan sebagai berikut:

- a. Rasio Gini < 0,4, artinya tingkat ketimpangan rendah
- b. $0,4 < \text{Rasio Gini} < 0,5$, artinya tingkat ketimpangan moderat
- c. Rasio Gini > 0,5, artinya tingkat ketimpangan tinggi

2.6. Pengangguran dan Ketenagakerjaan

Data angkatan kerja yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan *the labour force concept* yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja dan bukan usia kerja.

Gambar 2.1 : Diagram Konsep Ketenagakerjaan



Sumber : BPS Indonesia

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

TPAK dihitung dengan membandingkan data angkatan kerja dengan data penduduk usia kerja. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan proporsi angkatan kerja yang semakin membesar pada struktur demografi suatu wilayah. Dengan melihat telah dan siap untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, tingginya TPAK tidak selalu berarti membaiknya kinerja ketenagakerjaan. Apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan dalam proporsi penduduk bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja, maka dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100$$

Konsep pengangguran (*jobless*) yang digunakan oleh BPS adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau *open unemployment rate* merupakan indikator ketenagakerjaan untuk melihat persentase proporsi penduduk yang tidak bekerja (*jobless*) dalam angkatan kerja. Angka ini diinterpretasikan sebagai jumlah pengangguran (tidak bekerja atau sedang mencari kerja) dari 100 orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap atau masuk di pasar kerja

$$TKK = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$
$$= 100\% - TPT$$

2.7. Kemiskinan

Konsep kemiskinan yang digunakan di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Besaran nilai kebutuhan dasar minimum tersebut ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi makanan dan bukan makanan. Adapun besaran GK yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM).

Untuk mendapatkan GK di tingkat provinsi, BPS terlebih dahulu menentukan kelompok acuan sebanyak 20 persen dari penduduk dengan nilai konsumsi yang berada di atas garis kemiskinan sementara (GKS). GKS adalah GK pada periode sebelumnya yang telah dikalikan dengan faktor inflasi. Dari kelompok acuan tersebut kemudian dilakukan penghitungan nilai konsumsi terhadap 52 komoditas makanan yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung rata-rata kalori dari ke-52 komoditas tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh GKM. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilo kalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi.

Adapun GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Selanjutnya, penjumlahan dari GKM dan GKNM menghasilkan GK. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Pengukuran angka kemiskinan dibagi dalam tiga betuk yaitu :

- a. **Head Count Index (HCI-P0)** adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah bawah Garis Kemiskinan (GK)
- b. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*)** merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. **Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*)** memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi ekonomi. Dimensi kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan diukur dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi ekonomi diukur dengan jumlah pengeluaran. Metode terbaru penghitungan IPM adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kesehatan : } I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH_0 - AHH_{0_{\min}}}{AHH_{0_{\max}} - AHH_{0_{\min}}}$$

Indeks Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Indeks Pengeluaran :

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln_{\text{pengeluaran}} - \ln_{\text{pengeluaran}_{\min}}}{\ln_{\text{pengeluaran}_{\max}} - \ln_{\text{pengeluaran}_{\min}}}$$

Selanjutnya untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Komponen	Satuan	Min	Max
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH ₀)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Sumber :BPS (2015)

Adapun langkah berikutnya adalah melakukan angrerasi terhadap masing-masing komponen IPM untuk membentuk dan mendapatkan nilai angka IPM, dengan formula sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin besar nilai IPM menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori: rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nilai IPM untuk masing-masing kategori tersebut disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kategori Nilai IPM

No.	Nilai IPM	Kelompok
1.	IPM < 60	Rendah
2.	60 ≤ IPM ≤ 70	Sedang
3.	70 ≤ IPM ≤ 80	Tinggi
4.	IPM > 80	sangat tinggi

Sumber: BPS, 2015

2.9. Kemampuan Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa rasio keuangan daerah (Halim, 2001) yaitu :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Penilaian terhadap Kemandirian Keuangan Daerah tersebut dapat merujuk kepada tabel kriteria berikut :

Tabel 2.3 : Kategori Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kategori Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Halim, 2001

2. Rasio Desentralisasi Fiskal. Rasio ini menunjukkan derajat kewenangan dan tanggung jawab yang dipikulkan oleh pemerintah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Penilaian terhadap rasio Desentralisasi Fiskal atau disebut juga dengan istilah Derajat Desentralisasi Fiskal dapat berpedoman pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Halim, 2001

BAB III METODOLOGI

3.1. Pendekatan Pelaksanaan

Pekerjaan penyusunan Kajian Indikator Pembangunan Ekonomi Kota Solok menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan datasekunder dan primer yang yang diperoleh dari dinas-dinas terkait dan studilapangan. Sementara data kualitatif diperoleh dari diskusi dengan tim teknis Kota Solok. Langkah berikutnya menganalisis data kualitatif dan kuantitatif yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan konsep teori dan perkembangan data Penggabungan kedua analisis ini, akan lebih memperluas wawasan permasalahan dan kondisi objektif makro ekonomi Kota Solok dalam beberapa tahun terakhir. Adapun rincian metode pendekatan kajian ini sebagai berikut :

- a. *Desk study* berupa kajian terhadap data-data sekunder yang dipublikasikan oleh lembaga terkait dan kemudian didiskusikan dengan tim teknis.
- b. Mengumpulkan berbagai informasi kualitatif dan kuantitatif, baik lisan maupun secara tertulis (terdokumentasikan) untuk melengkapi data sekunder yang sudah ada.
- c. Mencermati kebijakan makro ekonomi pemerintah pusat dan arah & strategi pembangunan ekonomi Kota Solok.
- d. Mencermati kondisi indikator pembangunan ekonomi saat ini dan prospeknya pada masa yang akan datang.

Data yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Indikator Pembangunan

Ekonomi Kota Solok ini bersifat dokumentatif (data sekunder) yang diperoleh dari berbagai instansi terkait yakni BPS, Bank Indonesia, Bappeda dan SKPD terkait serta situs *internet*.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah penelaahan dan penelusuran data yang telah terdokumentasikan oleh lembaga terkait. Beberapa data dapat juga diperoleh melalui situs internet. Selain itu, data dan informasi dikumpulkan pula dengan berdiskusi dengan tim teknis pemerintah Kota Solok.

3.3. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah mengikuti tinjauan konsep-konsep dan formula perhitungan ekonomi dan statistik. Untuk mempermudah dan mempercepat serta mencapai keakuratan perhitungan maka digunakan bantuan *software* statistik dan *excel*.

3.4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpulkan maka dilakukan sortir data. Sortir data adalah kegiatan untuk memilah-milah data yang relevan dan data yang kurang relevan bahkan mungkin tidak bermanfaat dalam penyusunan buku Kajian Indikator Pembangunan Ekonomi Kota Solok namun terikut dalam proses pengumpulan data sekunder. Selanjutnya data yang telah terpilah dianalisis dan disajikan secara deskriptif dan obyektif. Selanjutnya, hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk tabel maupun gambar serta bentuk grafis untuk memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprevia Lutfi Renaldy, Ismaini Zain (2018): Ekonomi dan Potensi Daerah Provinsi Jawa Timur Menggunakan *Similarity Weight and Filter Method (SWFM)*, INFERENSI, Vol. 1(2), December 2018, ISSN: 0216-308X
- BPS (2015), Indeks Pembangunan Manusia 2014: Metode Baru, Katalog BPS: 4102002
- Halim, Abdul (2001) Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi, UPP UMP YKPN, 2002.
- Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Wie, Thee Kian. 1981. Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan. Jakarta: Sinar Harapan